

Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana dalam Menghadapi Erupsi Merapi (Studi SMPN 1 Cangkringan Sleman Yogyakarta)

Roswanto, S.E., M.M.

Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB

e-mail: ruswan.bks@gmail.com

Abstrak

Sekolah Siaga Bencana (SSB) adalah sekolah yang secara sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan kompetensi dalam mengantisipasi bencana secara tepat dan berdaya guna. Salah satu sekolah yang ditargetkan oleh BPBD Kabupaten Sleman menjadi SSB adalah SMPN 1 Cangkringan. SSB di Yogyakarta ini sebagai strategi pengurangan risiko bencana atas ancaman utama erupsi Gunung Merapi. Penelitian ini mengkaji kesiapsiagaan SMPN 1 Cangkringan dalam menghadapi ancaman erupsi Merapi dilihat dari implementasinya. Penelitian terhadap SMPN 1 Cangkringan ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan diharapkan berkontribusi bagi BNPB untuk menciptakan rencana kontingensi menghadapi bencana dan memasukkan pelatihan SSB ke dalam kurikulum Pusdiklat BNPB. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan wawancara, pengamatan di lapangan, dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan SMPN 1 Cangkringan masih di level sedang. Secara struktural indikator kesiapsiagaan tercapai, yakni secara lokasi, penataan ruang, dan dukungan sarana prasarana. Secara nonstruktural masih ada beberapa hal yang belum tercapai, seperti belum adanya integrasi dengan kurikulum, belum tersedianya dokumen penilaian risiko bencana dan belum adanya rencana aksi yang ditinjau secara berkala (rencana kontingensi sekolah). Pemantauan dan evaluasi menjadi nilai penting untuk melihat keberlanjutan dari SSB.

Kata Kunci: kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, sekolah siaga bencana

PREPAREDNESS OF DISASTER PREPAREDNESS SCHOOL IN DEALING WITH THE ERUPTION OF MERAPI (Study of SMPN 1 Cangkringan Sleman Yogyakarta)

Abstract

Disaster Preparedness School (DPS) is a school that consciously and planned to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop competencies in anticipating disasters precisely and efficiently. One of the schools targeted by the Sleman Regency BPBD to become SSB is SMPN 1 Cangkringan. SSB in Yogyakarta is a disaster risk reduction strategy for the main threat of the eruption of Mount Merapi. This study examines the preparedness of SMPN 1 Cangkringan in facing the threat of the Merapi eruption in terms of its implementation. This research on SMPN 1 Cangkringan has never been carried out before and is expected to contribute to BNPB in creating contingency plans for dealing with disasters and incorporating SSB training into the BNPB Pusdiklat curriculum. This research uses qualitative methods, by conducting interviews, field observations, and collecting secondary data. The results showed that the preparedness level of SMPN 1 Cangkringan was still at a moderate level. Structurally, indicators of preparedness were achieved, namely in terms of location, spatial planning, and support for infrastructure. Nonstructurally, there are still some things that have not been achieved, such as the absence of integration with the curriculum, the unavailability of disaster risk

assessment documents and the absence of an action plan that is regularly reviewed (school contingency plan). Monitoring and evaluation are important values to see the sustainability of the SSB.

Keywords: *preparedness, disaster risk reduction, disaster prepared school*

PENDAHULUAN

Indonesia yang terkenal dengan sebutan “Laboratorium Bencana” memiliki banyak ancaman. BNPB mencatat terdapat 2.384 kejadian bencana alam yang terjadi hingga akhir Oktober 2020 (BNPB, 2020). Salah satunya adalah letusan gunungapi. Gunungapi di Indonesia merupakan bagian dari cincin api Pasifik yang terbentuk akibat zona subduksi antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Saat ini Indonesia memiliki 129 gunungapi aktif dengan kurang lebih 3,9 juta penduduk yang bermukim di wilayah sekitarnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah rawan bencana. Ancaman utamanya adalah erupsi Gunung Merapi yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan membuat banyak kerugian di Yogyakarta. Beberapa kerugian meliputi kerusakan sarana prasarana, kerusakan sarana pendidikan, kerusakan rumah sedang maupun parah, psikososial para korban, adanya korban jiwa, serta perekonomian yang harus terhenti. Erupsi Merapi 2010 dianggap sebagai erupsi terbesar setelah letusan 1982.

Risiko bencana yang dialami Indonesia dapat diminimalisir apabila dikurangi kerentanannya dan ditingkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Bencana mengandung arti ketidakseimbangan antara kapasitas yang dimiliki masyarakat di daerah rawan bencana dengan kerentanan yang dimilikinya. Begitu besar risiko yang dialami negara yang berada di *ring of fire*, sehingga Indonesia mengerucutkan “bencana” menjadi salah satu prioritas program pemerintah.

Belajar dari pengalaman penanggulangan bencana masa lalu

yang kurang memperhatikan pendekatan pengurangan risiko bencana, maka pembangunan sistem penanggulangan bencana perlu diselenggarakan dengan bertumpu pada prinsip pengurangan risiko bencana (PRB). Adanya ketidaksiapan masyarakat melatarbelakangi pentingnya PRB di Yogyakarta, yang diperkuat dengan Perda DIY Nomor 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam perda tersebut dituliskan bahwa satuan pendidikan wajib menginisiasi secara terintegrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan/kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait. Karenanya, program PRB tidak hanya dilakukan dalam masyarakat wilayah desa saja tetapi juga dilakukan di sekolah.

Banyaknya ancaman bencana di Indonesia, membuat BNPB memilih sebuah strategi yang langsung dilakukan di tingkatan bawah, salah satunya melalui edukasi kebencanaan. Hal ini menjadi jembatan antara pemangku kepentingan dalam hal kebencanaan dengan aktor muda yang mampu berkecimpung dan berperan untuk wilayahnya. Sejalan dengan itu, BPBD Kabupaten Sleman menargetkan sejumlah dunia pendidikan menjadi Sekolah Siaga Bencana (SSB). Salah satu sekolah yang telah terbentuk yaitu SSB SMPN 1 Cangkringan Sleman (BPBD Sleman, 2014).

SSB membangun budaya siaga dan budaya aman di sekolah dengan cara mengembangkan jejaring bersama para pemangku kepentingan di bidang penanganan bencana; meningkatkan kapasitas institusi sekolah dan individu dalam mewujudkan tempat belajar yang lebih aman bagi warga sekolah; dan menyebarkan ilmu

kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur pendidikan sekolah.

Agar sejalan dengan rencana kontingensinya, SSB perlu optimalisasi dengan cara dikaji implementasinya. Dalam Konsorsium Pendidikan Bencana (2008), kajian tingkat kesiapsiagaan sekolah menggunakan 4 indikator yaitu pengetahuan dan sikap, kebijakan sekolah, perencanaan kesiapsiagaan, dan mobilisasi sumber daya.

Berdasarkan penelitian Septikasari (2014) Kabupaten Sleman sudah memiliki 14 SSB sampai tahun 2014, yang terdiri dari 9 SSB di Kawasan Rawan Bencana/KRB III, 1 SSB di KRB II, dan 4 SSB di KRB I.

Kawasan Rawan Bencana (KRB) I merupakan kawasan yang rawan terhadap ancaman banjir lahar, dalam hal ini dikategorikan sebagai kawasan paling ringan. KRB I dibagi menjadi 2 yaitu: (a) terletak di daerah aliran sungai yang berhulu di sekitar puncak dan (b) pemukiman yang letaknya rawan terhadap hujan abu tanpa memperhatikan arah angin dan kemungkinan terkena batuan magmatik. Kebijakan pemerintah dalam pengurangan risiko bencana di kawasan ini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, penelitian, serta ilmu pengetahuan. KRB II merupakan kawasan yang terancam aliran awan panas, aliran lava, lahar, serta lontaran batu pijar. Masyarakat diwajibkan mengungsi ketika ada kenaikan status Merapi. KRB III merupakan kawasan yang paling berbahaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman kawasan ini merupakan zona merah yang tidak diizinkan adanya hunian.

Hasil penelitian Septikasari (2014) menunjukkan bahwa KRB I memiliki 1 SSB dengan kriteria siap dan 3 SSB dengan kriteria belum siap. Perbedaan kesiapsiagaan SSB dipengaruhi oleh keaktifan komunitas

sekolah, kelengkapan sarana prasarana pendukung kegiatan kebencanaan, kelengkapan dokumen kebencanaan, kerja sama berbagai pihak, dan inovasi pelaksanaan kegiatan SSB. Inovasi dalam SSB meliputi inovasi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, integrasi dengan materi kebencanaan, sistem peringatan dini, alat peringatan dini, dan kerja sama dengan berbagai pihak mengenai kegiatan kebencanaan.

Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi kesiapsiagaan SSB SMPN 1 Cangkringan dalam menghadapi bencana erupsi Merapi disertai dorongan dan hambatan yang terjadi. Penelitian yang terkait dengan penanggulangan bencana maupun kesiapsiagaan SSB sudah pernah menjadi topik beberapa peneliti. Akan tetapi, kesiapsiagaan SSB dalam menghadapi erupsi Merapi di SMPN 1 Cangkringan belum pernah menjadi tema untuk diteliti.

Dalam rencana kontingensi BPBD dan Pemerintah Kabupaten Sleman 2015, SMPN 1 Cangkringan dijadikan daerah penyangga bagi kawasan di atasnya (KRB II dan III) termasuk dalam menyelenggarakan pendidikan darurat. Namun, menurut informasi warga SMPN 1 Cangkringan, muncul kekhawatiran saat terjadi letusan kembali di tahun 2020 sehingga mengakibatkan mereka ikut mengungsi ke wilayah di bawahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapsiagaan SSB SMPN 1 Cangkringan dalam menghadapi ancaman erupsi Merapi dilihat dari implementasinya. Penelitian dalam hal kesiapsiagaan SSB ini seyogyanya dapat memberikan masukan tidak hanya untuk internal sekolah tetapi juga menjadi rekomendasi pemerintah khususnya BNPB/BPBD dalam membuat rencana kontingensi sekolah untuk menghadapi bencana. Selain itu, juga menjadi bahan masukan untuk mengagendakan pelatihan dengan topik kesiapsiagaan sekolah. Selama ini

pelatihan di Pusdiklat BNPB berkisar tentang manajemen bencana. Kurikulum dan pelatihan SSB belum menjadi program khusus Pusdiklat BNPB.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kesiapsiagaan SSB SMPN 1 Cangkringan dalam menghadapi ancaman erupsi Merapi dilihat secara struktural dan nonstruktural.

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif lebih mengandalkan proses daripada hasil sehingga yang dilihat dalam penelitian ini yaitu interaksi simbolik berdasarkan pada pengalaman manusia secara alamiah yang dapat membentuk sebuah wahana untuk menemukan kebenaran atau dapat juga lebih membenarkan kebenaran (Moleong, 2006).

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2020, terdiri dari kegiatan pralapang, pengambilan data, hingga pengolahan data. Penelitian dilakukan di SMPN 1 Cangkringan, sekolah yang berada di KRB I Merapi beralamat di Dusun Watuadeg, Desa Wukirsari RT 01 RW 29, Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Sebagai Sekolah Siaga Bencana, SMPN 1 Cangkringan perlu dianalisis kesiapsiagaannya sebagai bahan evaluasi pembaruan rencana kontingensi bencana di Kabupaten Sleman.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap siswa sebagai subjek utama, perwakilan dari warga sekolah (kepala sekolah, guru-guru yang terlibat dalam pengurangan risiko bencana, dan penjaga sekolah), tokoh masyarakat, pegawai BPBD Sleman, LSM Lingkar, BPPT Kebencanaan Geologi, dan beberapa informan lainnya. Sementara

itu, teknik observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan sekolah, kondisi geografis, dan fasilitas pendukung. Penelitian didukung data-data sekunder seperti dokumen rencana kontingensi, data BPS Kecamatan Cangkringan, BPPT Kebencanaan Geologi Merapi, data wilayah pengungsian Kelurahan Kepuharjo, dan Keputusan Bupati Sleman tentang Status Tanggap Darurat Bencana Merapi.

Pada tahapan analisis data, informasi yang terkumpul akan disinkronkan. Langkah pertama adalah reduksi data, dengan membuat rangkuman inti dari data-data yang telah didapatkan, agar data yang ditemukan tidak menyimpang dari pertanyaan penelitian. Kemudian dilakukan pengategorian. Data yang telah didapatkan dari hasil survei lapang/observasi, wawancara, maupun dokumentasi dikelompokkan sesuai kategori yang telah dipilih. Kemudian dilakukan pemeriksaan keabsahan data melalui metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penggabungan antara data yang satu dengan yang lain serta dari sumber satu dengan sumber yang berbeda (Sugiyono, 2007). Langkah terakhir dalam analisis data yaitu penyajian hasil penelitian serta pengambilan kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

GAMBARAN UMUM SMPN 1 CANGKRINGAN

SMPN 1 Cangkringan yang beralamatkan di Watuadeg Wukirsari Cangkringan Sleman Yogyakarta berada di koordinat bujur 110.44368982315063, koordinat lintang -7.649539535770101, dan ketinggian 497m dpl. Dasar berdirinya adalah SK 090/Kanwil.PK/E.III/1976 tentang Penunjukan Penggunaan/Pemakaian Tanah, Gedung Sekolah dan Perlengkapannya untuk S.T. Negeri II

Sleman/ SMP Negeri Peralihan Cangkringan Sleman. Sekolah ini berdiri pada tahun 1976, dengan luas tanah 20.000m², dipergunakan untuk bangunan seluas 1.556 m².

Sebagai salah satu instansi yang berada di wilayah Kecamatan Cangkringan, SMPN 1 Cangkringan yang berada di luar KRB III juga dituntut untuk melakukan kesiapsiagaan penanganan darurat dan berperan dalam penyelenggaraan pendidikan darurat. SMPN 1 Cangkringan menjadi penyangga bagi wilayah yang terdampak langsung terkena erupsi Merapi.

Bangunan SMPN 1 Cangkringan relatif masih aman karena telah dilakukan renovasi gedung di tahun 2019, dengan dana APBD Kabupaten Sleman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah tertata rapi, bersih, serta sejuk. Masih terdapat banyak ruang terbuka hijau untuk serapan air. Sejak tahun 2010 sekolah ini berada di 15 km dari puncak Merapi. Meski berada di KRB I, SMPN 1 Cangkringan berpotensi menjadi aliran *wedhus gembel* atau awan panas, lava, guguran batu, gas beracun, maupun baju pijar dari kawah. *Wedhus gembel* maupun lava itulah yang kemudian menjadi perusak bagi lingkungan yang ada di sekitar.

SMPN 1 Cangkringan yang menjadikan sektor perikanan sebagai *icon*-nya itu memiliki 12 ruang kelas, dengan jumlah siswa pada tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 131 siswa, terdiri dari 52 siswa laki-laki dan 79 siswa perempuan. Sedangkan tenaga kependidikan berjumlah 28 orang. Ruang kelas telah dilengkapi fasilitas LCD dan proyektor, *white board*, kursi sesuai dengan jumlah siswa, dan papan tulis. Perpustakaan memiliki koleksi buku-buku yang relevan untuk pembelajaran siswa dengan rak buku yang tertata rapi. Sekolah memiliki laboratorium komputer yang dilengkapi Wi-Fi. Selain itu, ada ruang

praktik keterampilan, ruang OSIS, UKS, ruang bimbingan konseling, lapangan olah raga, dan musala.

Dampak erupsi di tahun 2010 adalah kerugian ekonomi pada sektor peternakan di Kecamatan Cangkringan dan di luar kecamatan, mencapai sekitar 21% dari populasi ternak terancam. Di SMPN 1 Cangkringan sendiri seluruh perikanan dan tanaman mati.

Pascaerupsi Merapi, bangunan SMPN 1 Cangkringan tidak mengalami kerusakan tetapi meninggalkan debu Merapi setinggi 5m di halaman ruang kelas dan halaman sekolah. Salah satu guru SMPN 1 Cangkringan menceritakan bahwa hingga 3 bulan pascaerupsi Merapi siswa belajar di tempat pengungsian dan para guru mencari siswa di tempat pengungsian lain serta mendata keberadaan para siswa. Dirasakan pembelajaran menjadi tidak maksimal.

IMPLEMENTASI KESIAPSIAGAAN SMPN 1 CANGKRINGAN

Tahun 2015, SMPN 1 Cangkringan dibentuk menjadi SSB yang saat ini menurut undang-undang berubah nama menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Beberapa indikator yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu indikator sikap dan tindakan, perencanaan kesiapsiagaan, kebijakan sekolah, dan mobilisasi sumber daya.

Ancaman Erupsi Merapi menjadi prioritas di SMPN 1 Cangkringan. Pemetaan karakteristik ancaman erupsi Merapi ditunjukkan dalam Tabel 1. Erupsi Merapi terjadi sangat cepat tetapi terdapat sela waktu antara peringatan dini, peringatan status, sampai akhirnya Merapi benar-benar erupsi. Sela waktu tersebut perlu dimanfaatkan dengan baik oleh warga sekolah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman erupsi Merapi.

Tabel 1. Karakteristik Ancaman Erupsi Merapi

N o	Karakteristik	Penjelasan Karakteristik
1	Penyebab	Pergerakan magma Gunung Merapi
2	Faktor yang merusak	Abu, pasir dan awan panas
3	Tanda-tanda peringatan	Suara gemuruh, gempa vulkanik, hewan-hewan turun dari gunung dan suhu meningkat
4	Sela waktu	1 minggu
5	Kecepatan hadir	360km/jam (hitungan menit)
6	Frekuensi	Satu hari sekali
7	Periode	Lima tahun
8	Durasi	20 menit
9	Intensitas	Besar
10	Posisi	15km

Kesiapsiagaan SMPN 1 Cangkringan secara Struktural

Seiring berjalannya waktu, sekolah telah melakukan kesiapsiagaan secara struktural yakni kesiapsiagaan secara fisik bangunan/sarana dan prasarana sekolah.

Aspek mendasar dalam pemilihan pembangunan sekolah yang aman yaitu luas lahan yang efektif untuk dibangun gedung sekolah, tempat bermain, serta sarana olahraga. Lahan tersebut harus jauh dari potensi bahaya yang mengancam pembelajaran maupun keselamatan jiwa warga sekolah. **Lokasi** SMPN 1 Cangkringan saat ini berjarak 15km dari Merapi. Selain itu, tidak dibangun di atas tanah bekas pembuangan sampah maupun dekat dengan sutet.

Dalam hal **penataan ruang kelas**, yang aman dari ancaman bencana adalah yang memiliki luas sesuai daya dukung kelas, tidak terlalu banyak barang di kelas, dan tidak ada ornamen yang membahayakan. Di SMPN 1 Cangkringan, ruang kelas terdiri dari 20 meja dan 40 kursi. Jarak antarmaja tidak sempit sehingga pergerakan menjadi leluasa. Ornamen bingkai dan jam dinding masih

tergantung di paku.

Dilihat dari **dukungan sarana dan prasarana**, SMPN 1 Cangkringan memiliki desain pintu yang sesuai dengan kriteria pengurangan risiko bencana yaitu pintu yang terbuka keluar. Berdasarkan hasil pengamatan, seluruh pintu sudah menghadap keluar. Sarana lain adalah ruang parkir. Lokasi SMPN 1 Cangkringan tidak dilalui oleh transportasi publik sehingga warga sekolah memilih menggunakan sepeda motor atau sepeda kayuh. Hampir 90% siswa menggunakan sepeda motor. Diharapkan mereka memarkir motor dengan muka motor menghadap keluar sehingga mempercepat proses evakuasi bila terjadi bencana. Gambar 1 menunjukkan ruang parkir SMPN 1 Cangkringan.



Gambar 1. Ruang Parkir SMPN1 Cangkringan

Kesiapsiagaan SMPN 1 Cangkringan secara Nonstruktural

Kesiapsiagaan nonstruktural merupakan cara pengurangan risiko bencana yang berorientasi kepada kebijakan sekolah, sikap dan tindakan, perencanaan kesiapsiagaan, serta mobilisasi sumber daya.

Sikap dan tindakan warga sekolah akan dilakukan secara berulang hingga menjadi sebuah kebiasaan jika ada persepsi pengetahuan & keterampilan yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana. Sikap dan tindakan meliputi:

1. *pengetahuan mengenai bahaya dan kerentanan*

Setelah dilakukan wawancara kepada beberapa anak kelas VIID dan

ID mengenai pengetahuan terhadap bahaya dan kerentanan, terbukti bahwa warga sekolah sudah mengetahui apa ancaman yang ada di sekitar beserta dampaknya. Mereka juga mengetahui ancaman prioritas serta sejarah bencana yang terjadi di sekolah mereka. Pengetahuan mengenai kerentanan di sekolah perlu ditingkatkan, seperti kesadaran mengenai kerentanan tangga sekolahnya. Pada beberapa sekolah termasuk SMPN 1 Cangkringan, tangga merupakan jalur evakuasi yang paling rentan. Hal ini disebabkan lantai yang terlalu licin atau tangga yang terlalu curam, ditambah lagi kepanikan siswa pada saat bencana terjadi.

Sebagian besar siswa SMPN 1 Cangkringan bertempat tinggal di kawasan utara Kabupaten Sleman. Mereka adalah saksi hidup sekaligus subyek yang pernah mengalami dampak erupsi Merapi. Berbeda dengan yang bertempat tinggal di kawasan selatan, mereka yang bertempat tinggal di utara dari kecil sudah terbiasa dengan tanda-tanda erupsi Merapi dan bersekolah di lereng Merapi. Pembelajaran mengenai ancaman maupun dampak sudah mereka terima sadari dini.

Pengalaman dan pendidikan sedari dini sangat mendukung berkembangnya pola pikir serta cara mereka menghadapi ancaman bencana erupsi Merapi. Mereka sudah tidak lagi panik tetapi sudah dapat melakukan evakuasi secara mandiri maupun membantu orang lain.

Temuan di lapangan tersebut sejalan dengan pendapat Mulyadi, T. dkk (2009) mengenai tujuan SSB yakni memberikan bekal pengetahuan kepada peserta didik tentang adanya risiko bencana dan cara mengantisipasi atau mengurangi risiko yang ditimbulkan.

2. Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum sekolah dan menjadi satu dalam pembelajaran

Secara umum, sekolah tersebut memang belum mengintegrasikan

materi kebencanaan ke dalam RPP kurikulum pelajaran normatif, utamanya kesiapsiagaan terhadap erupsi Merapi. Menurut beberapa warga sekolah, hanya pernah dilakukan simulasi kebencanaan. Akan tetapi, pada pembelajaran yang lebih mengutamakan praktik sudah terselipkan kesiapsiagaan bencana ancaman kebakaran.

3. Adanya keterampilan menjalankan rencana tanggap darurat.

Simulasi menjadi salah satu cara menguji warga sekolah dalam menjalankan rencana tanggap darurat sesuai rencana kontingensi. Pada hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional April 2019, sesuai edaran Kemendikbud bahwa semua sekolah harus melakukan simulasi bencana, dengan menggunakan rencana kontingensi 2015 SMPN 1 Cangkringan melakukan simulasi secara mandiri yang melibatkan beberapa warga masyarakat di sekitarnya. Simulasi yang dilakukan oleh SMPN 1 Cangkringan tersebut telah selinier dengan PP 21 tahun 2008.

4. Adanya sosialisasi kebencanaan

Sosialisasi penanggulangan bencana pernah dilakukan di SMPN 1 Cangkringan pada tahun 2015. Sosialisasi dilakukan sejalan dengan pembentukan SSB dari BPBD Kabupaten Sleman. Sosialisasi dilakukan selama kurang lebih satu minggu. Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari beberapa guru, siswa, kepala sekolah, warga masyarakat maupun petugas keamanan di desa seperti Perlindungan Masyarakat (Linmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Sosialisasi tersebut didampingi oleh LSM Lingkaran sebagai fasilitator dan narasumbernya. Menurut Nanik Eryanti, seorang satgas SSB, masyarakat dilibatkan dalam sosialisasi dan dalam kepanitiaan tanggap bencana karena tidak menutup kemungkinan saat ada bencana masyarakat akan bergabung ke sekolah.

5. Adanya pelatihan kebencanaan

Menurut para siswa SMPN 1 Cangkringan, pihak sekolah belum mengadakan kembali pelatihan rutin untuk mendukung penanggulangan bencana, melainkan hanya sekali saat simulasi saja. Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu pegawai honorer di sekolah tersebut.

Kesiapsiagaan nonstruktural lainnya adalah **kebijakan sekolah**, yang meliputi:

1. Dokumen PRB di Sekolah

Dokumen PRB di sekolah dapat berbentuk rencana aksi sekolah atau rencana kontingensi sekolah. SMPN 1 Cangkringan telah memiliki rencana kontingensi yang dibuat pada saat pembentukan Sekolah Siaga Bencana. LSM Lingkar membantu dalam pembentukan rencana kontingensi tersebut.

2. Akses bagi sekolah terhadap informasi kebencanaan

Semakin mudah mendapatkan informasi tentang penanggulangan bencana maka pemahaman warga sekolah terhadap kesiapsiagaan bencana juga akan meningkat. Media *online* dirasa lebih efektif bagi orang-orang milenial. Kelemahan dari media *online* adalah sulit dibendunginya informasi *hoax*. Banyak informasi dari media *online* yang tidak benar dan hanya memicu kepanikan warga masyarakat saja. Sebagai sekolah yang ada di utara, mereka memiliki website maupun beberapa akun instagram yang dapat dipercaya. Selain media *online*, informasi yang turun-temurun selalu menjadi informasi dasar bagi warga sekolah dalam meningkatkan kesiapsiagaan.

Kesiapsiagaan nonstruktural selanjutnya adalah **perencanaan kesiapsiagaan**, yakni sebuah dokumen maupun rencana kedaruratan termasuk peringatan dini yang berguna untuk mempercepat tanggap darurat yang efektif serta tepat. Perencanaan

kesiapsiagaan meliputi:

1. Tersedianya dokumen penilaian risiko bencana

SMPN 1 Cangkringan belum pernah memiliki dokumen penilaian risiko bencana. Berdasarkan Perka BNPB 4/2012 mengenai pembentukan SPAB, dokumen penilaian risiko bencana ini dibuat bersama-sama secara partisipatif, antara guru, siswa, serta komite sekolah. Dokumen ini disusun secara berkala disesuaikan dengan kerentanan sekolah.

2. Rencana aksi yang direvisi

Dalam rencana kontingensi yang dimiliki SMPN 1 Cangkringan belum tertuang rencana aksi. Namun, terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan setelah dibentuk SSB. Kebijakan ini belum ditinjau oleh sekolah sampai sekarang dan belum disebarluaskan ke warga sekolah.

3. Peta evakuasi dan rambu jalur evakuasi

Di SMPN 1 Cangkringan sudah ada rambu-rambu jalur evakuasi menuju titik kumpul (Gambar 2.), begitu juga rambu untuk titik kumpul. Saat ini titik kumpul (papan rambu) tidak terpasang dikarenakan rusak.



Gambar 2. Rambu Jalur Evakuasi

4. Kesepakatan dan ketersediaan lokasi evakuasi

BPBD telah membuat kesepakatan barak evakuasi yang terdekat dari sekolah dan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah maupun orang tua siswa. Nyami, tokoh masyarakat penggiat

kebencanaan sekaligus Kepala TK Kuncup Mekar Kepuharjo Cangkringan, menuturkan bahwa evakuasi siswa menuju Desa Glagahharjo, tidak jauh dari kantor Kecamatan Cangkringan.

5. *Prosedur tetap ditinjau dan dimutakhirkan secara partisipatif*

Protap SMPN 1 Cangkringan telah dilakukan secara partisipatif pada saat pembentukan SSB. Protap tersebut juga tercantum dalam rencana kontingensinya. Pada status normal, sekolah akan melakukan aktivitas pembelajaran seperti biasanya. Pada status waspada, SMPN 1 Cangkringan berperan sebagai *sister school*. Persiapan yang dilakukan oleh sekolah antara lain mempersiapkan kelas, jadwal, guru yang mengajar, dan sarana prasarana. Kenaikan status yang ketiga, ketika status Gunung Merapi dinaikkan menjadi siaga, kelas belajar mengajar di SMPN 1 Cangkringan masih berjalan biasa. Komunikasi masih tetap berjalan dengan BPBD maupun BPPTKG serta masih menjadi sekolah paseduluran bagi SMP Taman Dewasa. Pada status keempat/'awas" tim informasi dan pendataan menerima status awas dari BPPTKG/BPBD/UPT Pendidikan/Lurah dan instruksi evakuasi dari UPT Pendidikan dan/atau lurah. Lalu tim informasi dan pendataan memberikan informasi perubahan status pada kepala sekolah dan tim yang lain. Maka seluruh tim mulai bekerja untuk evakuasi siswa serta memikirkan sekolah darurat esok hari.

Kesiapsiagaan nonstruktural yang terakhir adalah **mobilisasi sumberdaya**. Hal ini berdasarkan pada kemampuan sekolah untuk mengumpulkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan, meliputi:

1. *Jumlah siswa yang terlibat dalam kebencanaan*

SMPN 1 Cangkringan menurut Nanik Eryanti, memiliki tim siaga bencana yang juga direkrut dari siswa baru. Tim siaga bencana ini dibantu

oleh organisasi PMR dan Pramuka. Ketika terjadi bencana mereka sudah melakukan tindakan awal untuk mengevakuasi. Mereka dimasukkan ke dalam satuan tugas SMPN 1 Cangkringan sebagai bagian garda kemanusiaan kebencanaan. Beberapa anggota tim sudah ada yang lulus.

2. *Kerjasama antara sekolah dengan BPBD, Dinas Pendidikan, desa, dan LSM*

Kerjasama sekolah dengan BPBD antara lain simulasi 2015, informasi-informasi kebencanaan, dan rekomendasi. Pemerintah desa maupun warga masyarakat juga ikut serta dalam penanggulangan bencana. Rencana tanggap darurat harus diketahui dan sejalan dengan perencanaan yang ada di desa. Hal ini agar sekolah yang merupakan tanggung jawab desa termonitor oleh desa maupun Desa Tangguh Bencana (Destana), dan dapat juga menjadi salah satu prioritas dalam tanggap darurat. LSM Lingkar menjadi pendamping dalam penyelenggaraan SSB di sekolah. Rencana kontingensi dalam bentuk *hardcopy* maupun dokumentasi pembentukan SSB tersimpan di BPBD Kabupaten Sleman.

KENDALA DALAM IMPLEMENTASI SSB

Kendala tidak hanya dirasakan oleh siswa dan guru sebagai subyek PRB di sekolah, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat, lembaga pendampingan, maupun BPBD sebagai pelaksana program dari pusat. Kendala yang ada, antara lain:

1. Tidak tersedianya dana yang dialokasikan langsung ke kegiatan SSB.
2. Belum integrasinya PRB ke dalam kurikulum.
3. Belum dilakukan pemutakhiran. Disebutkan dalam sosialisasi SSB 2015, guru sebagai koordinator tim dan siswa juga masyarakat sebagai anggota tim. Tetapi hingga 2020, tim siaga tersebut tidak diperbarui apakah guru mutasi dan apakah siswa telah lulus. Demikian pula

prosedur tetap/SOP tanggap darurat maupun rencana kontingensi tidak ditinjau secara berkala.

4. Data rencana kontingensi di sekolah hilang/rusak tertimbun abu.
5. Perubahan arah awan panas di luar prediksi mengakibatkan perubahan rencana evakuasi.
6. Pihak swasta belum membantu untuk PRB.

SSB bertujuan membudayakan pengurangan risiko bencana pada anak didik, sehingga merupakan program jangka panjang yang membutuhkan pembiayaan tidak sedikit. Saat ini swasta hanya bekerja sama untuk penyaluran pekerjaan saja.

7. Pemantauan dan evaluasi.

Pemantauan dan evaluasi adalah kegiatan melihat progres kegiatan agar menjadi dasar dalam pengambilan keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan serta melihat kendalanya. BPBD Kabupaten Sleman belum memiliki sistem pemantauan secara berkala. Namun, sebenarnya pemantauan dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Beberapa *baseline* sebagaimana yang terdapat pada Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2012 juga dapat digunakan sebagai pemantauan SSB secara mandiri.

Tingkat Kesiapsiagaan SMPN 1 Cangkringan dari 2010-2020

SMPN 1 Cangkringan mengalami dampak yang sangat signifikan saat terkena erupsi Merapi 2010. Sarana prasarana rusak. Kegiatan pembelajaran dipindah ke SMPN 3 Depok kurang lebih 3 bulan lamanya. Namun, tahun 2010 tersebut justru menjadi titik balik menuju pandangan sekolah baru. SMPN 1 Cangkringan mengalami 3 proses hingga pada kondisi saat ini.

SMPN 1 Cangkringan kemudian dipindahkan ke lokasi yang aman. Pada kesempatan itu, para perangkat guru

bersama-sama membuat satu kerangka sekolah yang mereka inginkan. Perubahan tersebut meliputi kurikulum yang berbeda, cara pembelajaran yang berbeda, kelima organisasi yang dibentuk, pendanaan dari swasta maupun dari pemerintah. Namun, hal tersebut belum mengubah ketakutan warga sekolah terhadap ancaman erupsi Merapi sekalipun sudah berada di lokasi yang cukup aman.

Pada tahun 2015, BPBD Kabupaten Sleman membentuk SMPN 1 Cangkringan sebagai Sekolah Siaga Bencana. Dalam pembentukan tersebut, BPBD Kabupaten Sleman melakukan kajian risiko, pembuatan rencana kontingensi, prosedur tetap, tim siaga, pembuatan SOP, dan rencana aksi sekolah. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, rasa trauma sedikit demi sedikit memudar. PRB sudah menjadi budaya bahkan banyak dari siswa SMPN 1 Cangkringan yang memaparkan PRB ini kepada keluarganya. Warga sekolah sudah mulai siap menghadapi erupsi Merapi karena keluarga mendukung budaya PRB tersebut.

Ketika terjadi erupsi Merapi, siswa yang rumahnya di utara tidak akan pulang dulu ke rumahnya tetapi akan ikut proses evakuasi dari sekolah menuju ke selatan. Para orang tua sudah tidak akan panik akan keselamatan anaknya karena sudah menjadi tanggung jawab sekolah. Keluarga juga mendapatkan pengetahuan mengenai tas siaga. Para siswa juga memberikan nomor dari teman maupun guru mereka kepada para orang tua supaya saat mereka dievakuasi dan susah dihubungi, orang tua dapat langsung menghubungi guru yang bersangkutan.

Hasil dari analisis tingkat kesiapsiagaan dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan hasil analisis, tingkat kesiapsiagaan SMPN 1 Cangkringan berada di level sedang. Hal ini dapat menjadi masukan atau pelengkap data

SSB yang berada di KRB I. Penentuan level ini berasal dari penghitungan persentase skor lembar observasi kesiapsiagaan sekolah, yaitu: di mana skor yang didapat adalah 74%.

$$P (\text{persentase}) = \frac{\text{Jumlah skor pencapaian indikator}}{\text{Jumlah skor maksimal indikator}} \times 100\%$$

Setelah persentase diperoleh maka dikategorikan dalam tiga kategori pengetahuan kesiapsiagaan bencana pada Tabel 3.

Tabel 2. Tingkat Kesiapsiagaan SMPN Cangkringan

No	Indikator	Terca pai	Belum Tercapai
STRUKTURAL			
1	Lokasi aman	ya	-
2	Penataan ruang kelas yang aman	ya	-
3	Dukungan sarana prasarana sesuai kriteria	ya	-
NONSTRUKTURAL			
1	Sikap dan Tindakan		
	Pengetahuan mengenai bahaya, kerentanan, dsb	ya	-
	Integrasi PRB pada kurikulum	-	belum
	Keterampilan menjalan rencana tanggap darurat	ya	-
	Sosialisasi kebencanaan	ya	-
	Pelatihan kebencanaan yang diselenggarakan secara berkala di sekolah	-	belum
2	Kebijakan Sekolah		
	Memiliki dokumen PRB	ya	-
	Akses bagi komunitas sekolah terhadap informasi	ya	-
3	Perencanaan Kesiapsiagaan		
	Tersedianya dokumen penilaian risiko bencana	-	belum
	Rencana aksi sekolah yang direvisi	-	belum
	Tersedianya peringatan dini	ya	-
	Peta vakuasi	-	belum
	Rambu evakuasi	ya	-
	Kesepakatan dan ketersediaan lokasi evakuasi	ya	
	Protap direview dan mutakhir	ya	-
4	Mobilisasi sumberdaya		
	Jumlah peserta didik yang terlibat dalam kegiatan kebencanaan	ya	-

Tabel 3. Skor Kesiapsiagaan Bencana

Nilai	Kategori
80 - 100	Tinggi
60 - 79	Sedang
< 60	Rendah

Dalam perjalanannya masih ada beberapa hal yang menjadi *gap* seperti belum adanya integrasi dengan kurikulum, belum tersedianya dokumen penilaian risiko bencana dan belum adanya rencana aksi yang ditinjau secara berkala (rencana kontingensi sekolah). Pemantauan dan evaluasi menjadi nilai penting untuk

melihat keberlanjutan dari SSB.

Implementasi kesiapsiagaan SMPN 1 Cangkringan seyogyanya mendapat perhatian untuk ditingkatkan mengingat sekolah berada di kawasan rawan bencana (KRB I). Kesiapsiagaan yang meningkat menimbulkan rasa aman dan kepercayaan diri warga sekolah dalam perannya sebagai sekolah penyangga bagi sekolah yang berada di KRB II dan III.

Sejalan dengan Koswara dkk. (2019) dalam buku Pendidikan Tangguh Bencana, penyelenggaraan SSB dilakukan elaborasi dengan kebijakan pemerintah, yakni sekretariat bersama SSB daerah yang dibentuk kepala daerah serta sekretariat nasional yang diketuai langsung oleh Sekjen Kemendikbud. Pemerintah dapat memadukan penyelenggaraan program SSB ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.

PENUTUP

SIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Tingkat kesiapsiagaan SMPN 1 Cangkringan berada di level sedang.
2. Sekolah sudah memenuhi standar kesiapsiagaan secara struktural yang meliputi lokasi, tata ruang kelas, dan dukungan sarana prasarana.
3. Belum ada integrasi pengetahuan kebencanaan ke dalam kurikulum dan RPP, tetapi secara tidak langsung masuk ke dalam pelajaran adaptif.
4. Sekolah pernah melakukan pelatihan bencana saat simulasi di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, tetapi belum melakukannya secara berkala.
5. Sekolah memiliki dokumen PRB, namun belum menjadi satu acuan dan belum pernah melakukan tinjauan berkala.
6. Akses terhadap informasi kebencanaan mudah didapatkan melalui internet, buku, dan warga

sekitar.

7. Sekolah belum memiliki dokumen penilaian risiko bencana dan memperbarui rencana aksi.
 8. Tersedia sistem peringatan dini yang terpadu, rambu jalur evakuasi yang telah terpasang di seluruh sekolah, prosedur tetap yang telah ditinjau melalui simulasi, serta kesepakatan dengan desa maupun BPBD mengenai lokasi evakuasi yang aman saat terjadi erupsi Merapi.
 9. Sejumlah warga sekolah terlibat dalam tim siaga bencana.
 10. Ada kerja sama sekolah dengan pihak lain seperti dengan BPBD, LSM Lingkar, dan pemerintah desa, tetapi belum dengan pihak swasta.
 11. Beberapa implementasi dan kendalanya tersebut kiranya perlu dilakukan evaluasi.
 12. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak mudahnya menggali informasi yang mendalam karena beberapa dokumen telah hilang tertimbun abu vulkanik, guru yang menjadi tim siaga bencana pension, dan kurang mengambil banyak referensi penelitian lain.
 13. Namun demikian, dengan melibatkan unsur utama siswa dan guru/kepala sekolah yang terlibat dalam pengurangan risiko bencana dan bersinggungan langsung dengan keberadaan SSB SMPN 1 Cangkringan, ditunjang dengan instansi-instansi terkait, harapannya penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian berikutnya.
- Pusdiklat BNPB atau BPBD Sleman dalam pengembangan program kurikulum pendidikan dasar kebencanaan. Dapat pula menggunakan media-media ajar dari berbagai lembaga yang telah menyusun beragam media ajar kebencanaan.
 2. Sekolah meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pengurangan risiko bencana dengan melakukan sosialisasi dan simulasi setiap tahun pada saat masa orientasi, Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Hari Pendidikan Nasional, Hari Anak Nasional, Hari Pramuka, Hari Kemanusiaan Sedunia, dll. Simulasi yang sering dilakukan mempengaruhi alam bawah sadar.
 3. Ekstrakurikuler pramuka dan PMR disisipi muatan pengetahuan teknis kebencanaan.
 4. Sekolah aktif memetakan kerentanan yang dimilikinya.
 5. Sekolah memiliki dokumen penilaian agar dapat melakukan pemantauan dan evaluasi ketangguhan sekolah secara mandiri. Upaya ini dapat dibantu oleh BNPB atau Kemendikbud.
 6. Sekolah mempertimbangkan Permendiknas 24/2007 sebagai upaya memberikan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang disabilitas, bekerja sama dengan Dinas Sosial.
 7. Sekolah memasang alat pemadam kebakaran (apar) di dinding yang terjangkau untuk memberikan respon cepat penanganan kebencanaan.
 8. Sekolah menyediakan alat komunikasi (alkom) untuk penjaga sekolah agar dapat berkoordinasi dengan pemangku kebijakan sekolah akan ancaman bencana.
 9. Sekolah memasang informasi nomor-nomor penting di pos jaga untukantisipasi mendapatkan

SARAN

Saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, adalah:

1. Sekolah mengintegrasikan materi penanggulangan bencana ke dalam kurikulum dan RPP mata pelajaran baik normatif, adaptif, maupun produktif. Dinas Pendidikan kabupaten bersinergi dengan

- bantuan 1x24 jam.
10. Sekolah memasang peta evakuasi dan rambu titik kumpul. Rambu ini bisa didapatkan dari BPBD atau dinas pendidikan.
 11. BPBD Sleman memperbarui rencana kontingensi, dengan mengajukan anggaran ke Bappeda.
 12. Lembaga pemerintah, PBB, dan NGO bekerja sama mendanai SSB.
 13. Dinas pendidikan kabupaten melakukan edukasi kepada guru siaga bencana dan mengoordinasi perubahan guru yang telah mutase.
 14. BPPTKG menerapkan warning system dan arahan yang lebih cepat tepat untuk mitigasi dan tanggap darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. 2020. Data Informasi Bencana Indonesia.
<http://bnpb.cloud/dibi/beranda>, Oktober 2020.
- BPBD Sleman. 2014. Wakil Bupati Resmikan Sekolah Siaga Bencana.
<https://bpbd.slemankab.go.id/wakil-bupati-resmikan-sekolah-siaga-bencana>
- Konsorsium Pendidikan Bencana. 2008. Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana. Jakarta: Konsorsium Pendidikan Bencana.
- Koswara, Asep, Avianto Amri, Faisal Khalid. 2019. Pendidikan Tangguh Bencana "Mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana di Indonesia". Jakarta: Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- LIPI-UNESCO. 2006. Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami. Jakarta: Deputi Pengetahuan Kebumih LIPI.
- Moleong, L. J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, T. dkk. 2009. Cerita dari Maumere

- Membangun Sekolah Siaga Bencana. Jakarta: LIPI-Compress.
- Septikasari, Z. 2014. Studi Komparasi Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana di Kabupaten Sleman. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Bandung Alfabeta.

DAFTAR ISTILAH

- | | |
|--------|---|
| SSB | Sekolah Siaga Bencana, sekarang dinamakan SPAB/ Satuan Pendidikan Aman Bencana. |
| BNPB | Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
| PRB | Pengurangan Risiko Bencana |
| BPBD | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| KRB | Kawasan Rawan Bencana |
| LSM | Lembaga Swadaya Masyarakat |
| BPPTKG | Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi |
| BPS | Badan Pusat Statistik |
| RPP | Rencana Pelaksanaan Pembelajaran |
| UPT | Unit Pelaksana Teknis |

